

STUDI PEMETAAN WILAYAH TERTINGGAL DI INDONESIA

Dyah Wulan Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

ABSTRAK

Persentase wilayah tertinggal di Indonesia masih relatif tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata juga belum mampu mengurangi persentase wilayah tertinggal di Indonesia. Banyak program penanggulangan kemiskinan dilakukan tetapi belum memberikan hasil yang berarti. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan wilayah tertinggal di Indonesia dengan harapan agar fokus program penanggulangan kemiskinan dimulai dari wilayah tertinggal yang belum mampu mengejar ketertinggalannya. Pemetaan ini dilihat melalui tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi dan tingkat dispersi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hampir semua wilayah/provinsi tertinggal di Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalannya. Dari tiga puluh provinsi di Indonesia, dua puluh enam provinsi di antaranya menunjukkan bahwa pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapitanya adalah divergen dan lima belas provinsi di antaranya dispersinya meningkat. Hal ini berarti ke dua puluh enam provinsi tersebut sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Di samping itu, kecenderungan tingkat dispersi yang meningkat menunjukkan tingkat penyebaran PDRB per kapitanya sangat timpang. Sebaliknya, hanya empat provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Barat yang pertumbuhan PDRB per kapitannya menunjukkan konvergen dan dapat mengejar ketertinggalannya dan hanya provinsi Jawa Barat saja yang tingkat dispersinya menunjukkan kecenderungan yang menurun.

Kata Kunci: Konvergensi absolut, konvergensi sigma, pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

The percentage of lagging regions in Indonesia is still relatively high. On the other hand, high economic growth was also not able to reduce the percentage of lagging regions in Indonesia. Many poverty reduction programs carried out but cannot provide meaningful results. Therefore, this study aims to map the regions lagging behind in Indonesia in the hope that the focus of poverty reduction programs starting from the left that have not been able to catch up. The mapping is viewed through the convergence rate of economic growth and the level of dispersion. The results of this study indicate that almost all the regions / provinces in Indonesia cannot be left behind to catch up. From thirty provinces in Indonesia, twenty-six provinces of which indicate that the growth of gross regional domestic product (GDP) per capita is divergent and the fifteen provinces of which the dispersion increases. This translates into twenty-six provinces are difficult to catch. In addition, the increased propensity of the dispersion shows GDP per capita level of deployment is very lame. In contrast, only four provinces, namely Jambi, South Sumatra, West Java, Lampung and per capita GDP growth shows convergent and can catch up and only the province of West Java that the dispersion shows a declining tendency.

Keywords: absolute convergence, sigma convergence, economic growth.



1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara berkembang yang lain. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia. Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari ini ternyata hampir sama dengan jumlah total penduduk dari Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Selain itu, Indonesia juga tidak mampu meningkatkan berbagai indikator utama pembangunan sosial dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lainnya. Tingkat kematian ibu hamil di Indonesia, misalnya, dua kali dari tingkat kematian di Filipina dan lima kali lebih tinggi dari Vietnam. Hampir setengah dari penduduk Indonesia tidak mempunyai akses yang cukup terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi (World Bank, 2007).

Selanjutnya, persentase wilayah tertinggal di Indonesia juga masih relatif tinggi. Hasil indentifikasi menunjukkan bahwa masih ada sekitar 47 persen atau sekitar 33 ribu desa tertinggal yang tersebar di 199 kabupaten di Indonesia. Tingginya persentase wilayah tertinggal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebaran wilayah tertinggal meliputi 58 Kabupaten di Pulau Sumatera, 123 Kabupaten di kawasan Indonesia Timur dan 18 kabupaten Pulau Jawa dan Bali. Ironisnya, ada 44 Kabupaten tertinggal yang berada di provinsi mapan (PNPM Mandiri 2010).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu keharusan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang lebih berarti. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *ouput* riil. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan adanya kenaikan *ouput* per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *ouput* riil per orang. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya *ouput* nasional, maka akan semakin banyak orang yang bekerja. Dengan demikian jumlah penduduk yang tidak bekerja akan dapat dikurangi secara signifikan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam mengurangi tingkat kemiskinan, yaitu syarat perlu (*necessary condition*) dan syarat cukup (*sufficient condition*). Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat cukupnya adalah pertumbuhan tersebut harus efektif

mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, pertumbuhan perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana orang miskin bekerja yaitu pertanian atau sektor yang padat karya. Secara tidak langsung, diperlukan tindakan pemerintah yang cukup efektif dalam meredistribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Umumnya pertumbuhan bersumber dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal, dan pemerintah diharapkan mampu meredistribusikan manfaatnya ke golongan penduduk miskin.

Di sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata masih belum mampu mengurangi jumlah dan persentasi penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 dan 2008 dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu sebesar 6,2 persen dan 6,3 persen tetapi jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2007 sebesar 37,17 juta jiwa atau ada sekitar 16,58 persen orang miskin di Indonesia. Bahkan pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 41,7 juta jiwa atau ada sekitar 21,92 persen orang miskin di Indonesia. Berdasarkan indikator kemiskinan ini, maka kemiskinan masih tetap menjadi masalah utama di Indonesia.

Namun demikian terdapat kecenderungan bahwa wilayah/daerah miskin akan mengurangi keteringgalannya dari wilayah/daerah kaya jika mampu mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kecenderungan tersebut memungkinkan terjadi di wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah/daerah miskin secara lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi wilayah/daerah kaya, maka diharapkan seiring waktu disparitas pendapatan antar daerah/wilayah akan memudar (makin konvergen). Hubungan antara tingkat pertumbuhan dan kemiskinan sangat jelas, pertumbuhan yang cepat sejalan dengan penurunan kemiskinan yang cepat pula dan kontraksi ekonomi beriringan dengan kenaikan angka kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka studi pemetaan wilayah tertinggal dan tingkat dispersi di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Untuk itu, studi ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat konvergensi PDRB per provinsi di Indonesia beserta tingkat dispersi regionalnya. Adapun kerangka berfikir dari studi ini sebagai berikut: Bagian kedua memaparkan

kajian pustaka yang dipakai sebagai dasar studi konvergensi, sedangkan bagian ke tiga menjelaskan data dan metode penelitian yang digunakan dalam studi. Selanjutnya, pada bagian ke empat akan

mendiskusikan hasil studi konvergensi dan tingkat dispersi di Indonesia. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan akan disajikan pada bagian terakhir studi ini.



2. KERANGKA TEORITIS

Teori konvergensi pertumbuhan ekonomi dikembangkan dari model pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow (1956), Cass (1965), dan Koopmans (1965), yang selanjutnya dikembangkan oleh Barro dan Sala-i-Martin (1992). Saat ini, paradigma pertumbuhan neoklasik telah digunakan secara luas. Salah satu prediksi dasar teori pertumbuhan ekonomi neoklasik adalah bahwa perekonomian dengan rasio modal-tenaga kerja yang lebih rendah cenderung tumbuh lebih cepat daripada perekonomian dengan rasio modal tenaga kerja yang lebih tinggi. Jika perekonomian antar wilayah/daerah mempunyai selera, preferensi, dan teknologi yang sama, maka ada hubungan terbalik antara tingkat awal pendapatan per kapita dengan tingkat pertumbuhannya. Semakin rendah tingkat awal pendapatan per kapita, semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Hal ini disebabkan oleh adanya implikasi dari hukum pertambahan hasil yang menurun dari setiap adanya tambahan modal.

Konvergensi pertumbuhan ekonomi dapat diartikan bahwa wilayah/daerah miskin mempunyai kecenderungan untuk mengejar (*catch-up*) ketertinggalan dari wilayah/daerah kaya. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah adalah konvergen maka wilayah/daerah tertinggal tersebut dapat mengejar ketertinggalannya, jika tidak maka wilayah/daerah tersebut tidak bisa mengejar ketertinggalannya. Perekonomian yang konvergen adalah perekonomian miskin yang dapat mengurangi gap pendapatan dengan wilayah atau daerah kaya tiap tahunnya. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang konvergen dari suatu wilayah akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau *steady state* (Barro dan Sala-i-Martin, 1995).

Ada dua konsep utama konvergensi pertumbuhan ekonomi dalam literatur klasik, yaitu β -convergence dan σ -convergence (Sala-i-Martin, 1996). *Absolute β -convergence* menyatakan bahwa wilayah miskin memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih cepat dari wilayah kaya. Apabila $G_{i,t}$ adalah pertumbuhan PDB per kapita wilayah i dengan periode antara t dan $\ln(Y_{i,t})$ adalah logaritma natural PDB per kapita wilayah i pada periode t maka persamaan dapat

diformulasikan sebagai berikut;

$$G_{i,t} = + \ln(y_{i,t}) \dots\dots\dots(2.1)$$

Konsep σ -convergence menyatakan bahwa sekumpulan perekonomian akan konvergen apabila tingkat dispersi (σ) dari PDB real per kapita suatu perekonomian cenderung mengecil sepanjang waktu. Tingkat dispersi yang cenderung mengecil dapat dinyatakan sebagai berikut:

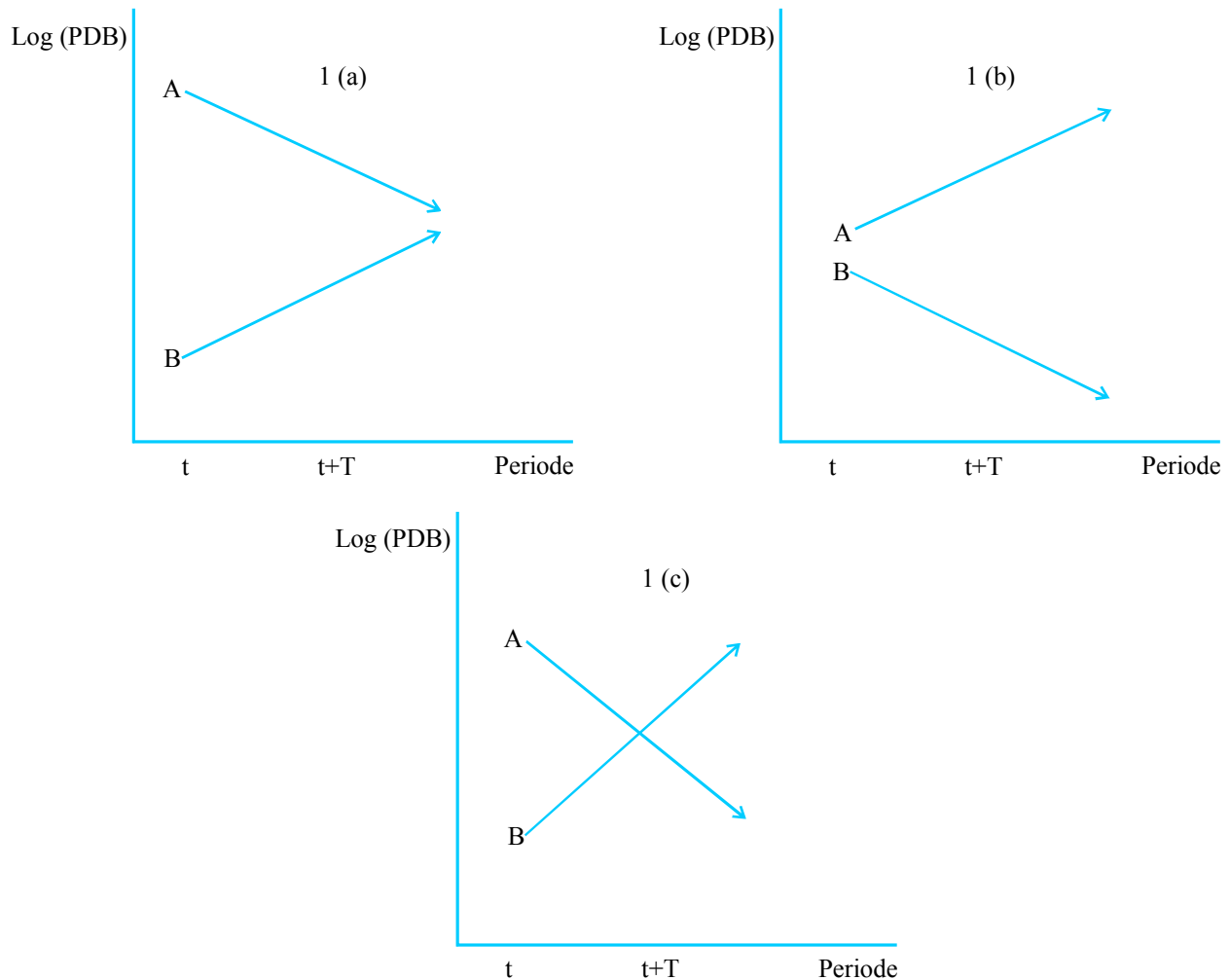
$$\sigma_{t+T} < \sigma_t \dots\dots\dots(2.2)$$

di mana σ_t adalah standar deviasi dari $\ln(y_{i,t})$ di wilayah i pada periode t . Kedua konsep β dan σ -convergence sangat berhubungan satu sama lain. Dari varians $\ln(y_{i,t})$ pada persamaan (2.1) maka akan didapatkan hubungan di antara σ_{t+T} dan σ_t , yang mana tergantung dari β . Jika tingkat PDB dari dua wilayah (kaya dan miskin) menjadi sama pada suatu waktu berarti wilayah miskin tersebut tumbuh lebih cepat.

Pada awalnya ada perbedaan tingkat pendapatan pada perekonomian A dan B. Perekonomian A lebih kaya daripada perekonomian B. Pada Gambar a, tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah A semakin mengecil daripada pertumbuhan ekonomi wilayah B pada periode t hingga periode $t + T$, oleh karena itu, dapat dikatakan ada σ -convergence. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak mungkin tingkat pendapatan dua perekonomian menjadi semakin dekat pada periode $t + T$, jika tidak mempunyai kondisi awal yang berbeda. Dalam kasus ini, perekonomian B tumbuh lebih cepat. Dengan kata lain, syarat perlu bagi adanya σ -convergence adalah adanya β -convergence.

Secara natural, pada awalnya wilayah miskin akan tumbuh lebih cepat dari wilayah kaya dan pada akhirnya tingkat PDB per kapita kedua perekonomian tersebut akan berada pada tingkat yang sama. Dengan kata lain, adanya β -convergence akan cenderung menyebabkan adanya σ -convergence. Sebagai contoh, Gambar 1(a) menunjukkan bahwa ada β -convergence berhubungan dengan adanya σ -convergence. Gambar 1(b) adalah contoh dari tidak adanya β -convergence dan tidak adanya σ -convergence (tingkat dispersi antar perekonomian semakin melebar dengan

berjalannya waktu). Dengan demikian konsep pada Gambar 1(a) dan 1(b) adalah identik.



Gambar 2.1. Hubungan antara σ dan β -convergence

Secara teoritis juga dimungkinkan bahwa wilayah miskin akan tumbuh lebih cepat tanpa diikuti tingkat dispersi yang semakin mengecil. Pada Gambar 1(c) menunjukkan bahwa wilayah miskin (B) tumbuh lebih cepat daripada wilayah kaya (A), sehingga dapat dikatakan ada β -convergence. Tetapi tingkat pertumbuhan wilayah (B) lebih besar daripada tingkat pertumbuhan wilayah (A) pada periode $t+T$, sehingga wilayah (B) tetap lebih kaya daripada wilayah (A). Hal ini menunjukkan bahwa pada periode $t+T$, gap pendapatan wilayah (A) dan (B)

adalah sama dengan pada periode t , tetapi wilayah (B) lebih kaya. Tingkat dispersi dari kedua perekonomian tersebut tidak mengecil dengan berjalannya waktu, atau tidak ada σ -convergence. Atau juga dapat dikatakan bahwa tingkat dispersi pada periode $t+T$ lebih besar daripada periode t . Dalam kasus ini terjadi σ -divergence meskipun terjadi β -convergence. Dengan demikian β -convergence tidak perlu selalu diikuti dengan σ -convergence.



3. DATADAN METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Di samping itu, jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan data *time series* dengan *cross section*. Periode data *time series* yang digunakan dalam studi ini adalah periode tahunan dari tahun 2000 sampai tahun 2007, sedangkan *cross section* individunya adalah provinsi di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi tiga puluh (30) provinsi. Selanjutnya, variabel yang digunakan dalam studi ini adalah

PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Teknik estimasi persamaan konvergensi pertumbuhan ekonomi menggunakan regresi data panel. Ada tiga kemungkinan metode atau teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasi persamaan konvergensi data panel. Menurut Verbeek (2001: 313-19) metode yang pertama adalah metode *pool least square* (PLS) sedangkan metode ke dua dan ketiga adalah *fixed effect* dan *random effect*, di mana dua metode terakhir disebut juga dengan metode *generalized least square* (GLS).

Secara umum model regresi data panel (3.1) di atas dapat diekspresikan sebagai berikut:

$$y_{it} = \mu + x'_{it} \alpha + \theta_i + \varepsilon_{it}, \quad \varepsilon_{it} \sim (0, \sigma_\varepsilon^2); \quad \theta_{it} \sim (0, \sigma_\theta^2) \dots\dots\dots (3.1)$$

Di mana *error term* dalam persamaan (3.1) terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama adalah *individual specific component* ($= \theta_i$), yang tidak berubah sepanjang waktu, sedangkan komponen yang ke dua adalah *remainder component* ($= \varepsilon_{it}$), yang diasumsikan tidak berkorelasi sepanjang waktu.

Jika metode GLS dipilih untuk mengestimasi persamaan konvergensi (3.1) maka akan ada dua alternatif metode yang bisa digunakan yaitu *fixed effects estimator* atau *random effects estimator*. Jika nilai ψ pada persamaan (3.2) lebih dari nol dan kurang dari satu ($0 < \psi < 1$), maka *random effects estimator* dibenarkan dalam mengestimasi persamaan konvergensi (3.1). Tetapi jika sama dengan nol ($\psi = 0$), maka sebaiknya menggunakan *fixed effects estimator* dalam mengestimasi persamaan konvergensi (3.1).

Penggunaan metode OLS akan menjadi tidak bias dan konsisten apabila error terms (θ_i dan ε_{it}) adalah *mutually independent* dan *independent* dengan x_{jt} (untuk semua j dan s). Tidak ada *autocorrelation* dalam struktur *error components* (θ_i dan ε_{it}) ditunjukkan dengan $\sigma_\theta^2 = 0$. Apabila tidak ada *autocorrelation* dalam struktur *error components* maka penggunaan metode OLS untuk mengestimasi koefisien dalam persamaan konvergensi (3.1) menjadi dibenarkan. Sebaliknya, apabila *error terms* berkorelasi sepanjang waktu $\sigma_\theta^2 \neq 0$, maka penggunaan metode OLS tidak dibenarkan.

$$\psi = \left[\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sigma_\varepsilon^2 + T\sigma_\theta^2} \right] \dots\dots\dots (3.2)$$

Apabila metode OLS tidak dibenarkan untuk diimplementasikan dalam mengestimasi persamaan konvergensi (3.1) maka alternatif berikutnya adalah menggunakan metode GLS. Dengan mengamati persamaan (5) maka dapat ditentukan apakah persamaan konvergensi (3.1) dalam penelitian ini diestimasi dengan metode OLS atau GLS. Jika σ_θ^2 sama dengan nol ($\sigma_\theta^2 = 0$) maka ψ akan sama dengan satu ($\psi = 1$). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada *autocorrelation*. Dengan demikian, metode OLS dapat diimplementasikan untuk mengestimasi persamaan konvergensi (3.1) dalam penelitian ini. Tetapi apabila ψ tidak sama dengan satu ($\psi \neq 1$) maka metode GLS yang seharusnya diimplementasikan dalam mengestimasi persamaan konvergensi (3.1).

Apabila model GLS dipilih untuk mengestimasi persamaan konvergensi (3.1) maka perlu menentukan apakah ada korelasi antara *individual effects* (θ_i) dan *explanatory variables* (x_{it}). Jika ada korelasi antara *individual effects* (θ_i) dan *explanatory variables* (x_{it}) maka menggunakan *random effects estimator* akan mengakibatkan pengestimasi yang tidak konsisten. Meskipun demikian, apabila ada korelasi antara *individual effects* (θ_i) dan *explanatory variables* (x_{it}) maka dapat diatasi dengan menggunakan model *fixed effects estimator*. Model *fixed effects* ini dapat menghilangkan pengaruh *individual effects* (θ_i) dalam persamaan konvergensi (3.1).

Untuk itu ada dua macam pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah persamaan konvergensi (3.1) dalam penelitian ini akan diestimasi dengan metode OLS atau GLS yang meliputi *fixed effects* dan *random effects*. Pengujian pertama adalah

dengan menggunakan *Breusch-Pagan test* (BP test), uji ini digunakan untuk mengkonfirmasi apakah persamaan konvergensi (3.1) diestimasi dengan menggunakan metode OLS atau GLS. Hipotesis nol daripada BP test adalah $\sigma_0^2 = 0$, yang berarti tidak ada *autocorrelation*, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah $\sigma_0^2 \neq 0$, yang berarti ada *autocorrelation*. Apabila hipotesis nol diterima maka untuk mengestimasi persamaan konvergensi (3.1) menggunakan metode OLS, tetapi jika hipotesis nol ditolak maka persamaan konvergensi (3.1) diestimasi dengan metode GLS.

Jika metode GLS terpilih untuk mengestimasi persamaan konvergensi (3.1) maka langkah selanjutnya adalah melakukan *Hausman test*. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah persamaan konvergensi (3.1) menggunakan *fixed effects* atau *random effects*. Hipotesis nol dari *Hausman test* adalah tidak ada korelasi di antara *individual effects* (θ_i) dan *explanatory variables* (x_{it}) dalam persamaan konvergensi (3.1). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara *individual effects* (θ_i) dan *explanatory variables* (x_{it}). Dengan demikian menggunakan *random effects* akan konsisten dan efisien, sedangkan hipotesis alternatif dari *Hausman test* adalah *individual effects* (θ_i) dan *explanatory variables* (x_{it}) saling berkorelasi. Untuk itu ada perbedaan yang signifikan antara *individual effects* (θ_i) dan *explanatory variables* (x_{it}). Dengan demikian menggunakan *fixed effects estimator* akan konsisten. Oleh karena itu, secara umum, dapat dikatakan apabila tidak dapat menolak hipotesis nol maka akan digunakan metode *random effect* sebaliknya jika menolak hipotesis nol maka akan digunakan metode *fixed effects*.

Alternatif lain dari persamaan konvergensi (3.1) dapat dinyatakan sebagai berikut (Sala-i-Martin, 1996):

$$G_{it} = \alpha + \ln(y_{it}) + u_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

Di mana,

G_{it} : pertumbuhan produk PDRB riil per kapita individu i tahun t

α : konstanta
 β : koefisien
 $\ln y_{it}$: logaritma natural PDRB riil per kapita individu i tahun t
 u_{it} : *error term* individu i tahun t

Koefisien b adalah $(1 - e^{-\beta t})$ dan merupakan koefisien parameter dari PDRB riil per kapita. Jika nilai $b < 0$ dan $0 < \beta < 1$ membuktikan adanya eksistensi konvergensi absolut pada pertumbuhan ekonomi PDRB riil per kapita. Sebaliknya, jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi atau apabila $b > 0$ dan $\beta < 0$ atau $\beta > 1$ maka menunjukkan kondisi divergen.

Selanjutnya, untuk mendukung hipotesis konvergensi absolut maka akan diestimasi konvergensi σ (sigma). Konvergensi σ diukur secara statistik dengan menggunakan perhitungan rumus standar deviasi dari *logaritma natural* PDRB per kapita harga konstan tahun 2000 setiap tahun dan setiap kota/kabupaten di Indonesia. Standar deviasi (σ) merupakan salah satu bentuk dispersi atau penyebaran. Rumus untuk menghitung standar deviasi adalah (Newbold, Carlson and Thorne, 2010:77):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{N}} \dots\dots\dots (3.4)$$

Di mana,

σ = tingkat dispersi
 n = jumlah kota/kabupaten
 y_i = logaritma natural PDRB per kapita kota/kabupaten i
 \bar{y} = Rata-rata logaritma natural PDRB per kapita

Konvergensi σ terjadi apabila nilai standar deviasi berkurang dari waktu ke waktu sebaliknya jika nilai standar deviasi meningkat dari waktu ke waktu maka yang terjadi adalah divergensi PDRB per kapita. Berkurangnya nilai standar deviasi berarti perbedaan PDRB per kapita antar wilayah mengecil sehingga PDRB per kapita wilayah miskin dengan berjalannya waktu akan sama dengan wilayah kaya.



4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ada tiga metode yang dimungkinkan untuk mengestimasi persamaan konvergensi absolut. Berdasarkan prosedur regresi data panel, 15 persamaan konvergensi menggunakan metode *pool least square* (PLS), 13 persamaan menggunakan model *fixed effect* (FEM), dan hanya 2 persamaan menggunakan model *random effect* (REM). Secara ringkas metode yang digunakan untuk mengestimasi persamaan konvergensi absolut pada masing-masing provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Metode Persamaan Konvergensi

No.	Provinsi	Metode
1	Nangro Aceh Darusalam	FEM
2	Sumatera Utara	FEM
3	Sumatera Barat	PLS
4	Riau	FEM
5	Jambi	REM
6	Sumatera Selatan	PLS
7	Bangka Belitung	PLS
8	Bengkulu	PLS
9	Lampung	REM
10	DKI Jakarta	PLS
11	Jawa Barat	PLS
12	Banten	FEM
13	Jawa Tengah	PLS
14	DI Yogyakarta	PLS
15	Jawa Timur	PLS
16	Bali	PLS
17	Kalimantan Barat	FEM
18	Kalimantan Tengah	FEM

No.	Provinsi	Metode
19	Kalimantan Selatan	FEM
20	Kalimantan Timur	FEM
21	Sulawesi Utara	FEM
22	Gorontalo	PLS
23	Sulawesi Tengah	FEM
24	Sulawesi Selatan	PLS
25	Sulawesi Tenggara	PLS
26	Nusa Tenggara	PLS
27	Nusa Tenggara Timur	FEM
28	Maluku	FEM
29	Maluku Utara	PLS
30	Papua	FEM

Keterangan:

FEM = *Fixed Effect Model*

REM = *Random Effect Model*

PLS = *Pool Least Square*

Berdasarkan metode estimasi Tabel 4.2, hasil estimasi koefisien b dan β menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia tidak konvergen. Dari tiga puluh (30) provinsi yang diteliti, dua puluh enam (26) di antaranya menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapitanya tidak konvergen. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir semua kota/kabupaten tertinggal di Indonesia sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Sebaliknya, hanya empat (4) provinsi saja yang pertumbuhan PDERB per kapitanya konvergen. Keempat provinsi tersebut adalah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Barat. Artinya bahwa wilayah kota/kabupaten miskin yang ada di provinsi tersebut dapat mengejar ketertinggalannya.

Secara rinci hasil estimasi koefisien b dan β masing-masing provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Estimasi Koefisien b dan Koefisien
Pada Persamaan Konvergensi Pertumbuhan PDRB di Indonesia

No.	Provinsi	Koefisien b	Koefisien β	$b < 0; 0 < \beta < 1$
1	Nangro Aceh Darusalam	0,5245	-0,7434	Tidak Konvergen
2	Sumatera Utara	0,5627	-0,8272	Tidak Konvergen
3	Sumatera Barat	0,1825	-0,2015	Tidak Konvergen
4	Riau	0,1345	-0,1444	Tidak Konvergen
5	Jambi	-0,0726	0,0700	Konvergen
6	Sumatera Selatan	-0,0718	0,0693	Konvergen
7	Bangka Belitung	0,0968	-0,1018	Tidak Konvergen
8	Bengkulu	0,0364	-0,0370	Tidak Konvergen
9	Lampung	-0,0726	0,0700	Konvergen
10	DKI Jakarta	0,0372	-0,0379	Tidak Konvergen
11	Jawa Barat	-0,0072	0,0071	Konvergen
12	Banten	0,5549	-0,8095	Tidak Konvergen
13	Jawa Tengah	0,0368	-0,0375	Tidak Konvergen
14	DI Yogyakarta	0,0056	-0,0056	Tidak Konvergen
15	Jawa Timur	0,0029	-0,0029	Tidak Konvergen
16	Bali	0,1907	-0,2116	Tidak Konvergen

No.	Provinsi	Koefisien b	Koefisien β	$b < 0; 0 < \beta < 1$
17	Kalimantan Barat	0,5297	-0,7543	Tidak Konvergen
18	Kalimantan Tengah	0,4637	-0,6231	Tidak Konvergen
19	Kalimantan Selatan	0,4313	-0,5645	Tidak Konvergen
20	Kalimantan Timur	0,3665	-0,4565	Tidak Konvergen
21	Sulawesi Utara	0,4008	-0,5121	Tidak Konvergen
22	Gorontalo	-5,3924	1,8551	Tidak Konvergen
23	Sulawesi Tengah	0,2762	-0,3232	Tidak Konvergen
24	Sulawesi Selatan	0,0197	-0,0199	Tidak Konvergen
25	Sulawesi Tenggara	0,0460	-0,0471	Tidak Konvergen
26	Nusa Tenggara	27,5305	-	Tidak Konvergen
27	Nusa Tenggara Timur	3,5105	-	Tidak Konvergen
28	Maluku	0,6762	-1,1277	Tidak Konvergen
29	Maluku Utara	0,2901	-0,3426	Tidak Konvergen
30	Papua	0,2918	-0,3451	Tidak Konvergen

Keterangan: Hasil perhitungan dari persamaan 3.3

Berdasarkan hasil perhitungan konvergensi sigma, dari tiga puluh (30) provinsi yang diteliti di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian hasil perhitungan tingkat dispersi menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Ada 15 provinsi

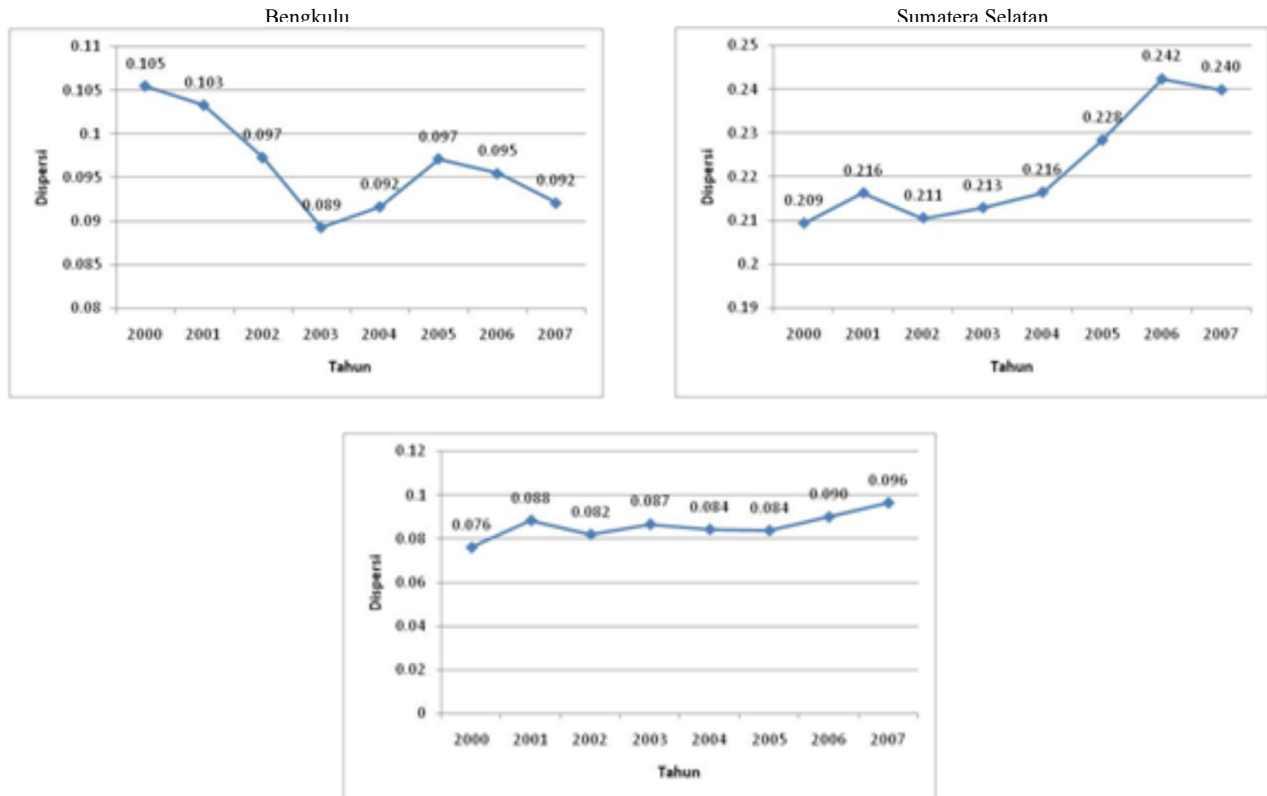
yang mempunyai kecenderungan tingkat dispersi yang meningkat. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil perhitungan konvergensi β , yang sebagian besar menunjukkan tidak konvergen, yaitu ada 26 provinsi dan hanya 4 provinsi saja yang konvergen.



Gambar 4.1 Hasil Perhitungan Konvergensi di Pulau Sumatera

Hasil perhitungan konvergensi sigma menunjukkan bahwa di Sumatera, 5 provinsi (Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi dan Sumatera Selatan) mempunyai kecenderungan konvergensi sigma yang meningkat dan 4 provinsi (Nangro Aceh Darusalam, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu dan Lampung) menurun. Di Jawa, hasil perhitungan konvergensi sigma menunjukkan bahwa di Jakarta dan Banten mempunyai kecenderungan dispersi yang meningkat, sedangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta

dan Jawa Timur menurun. Selanjutnya, di semua provinsi di Kalimantan tingkat dispersi mempunyai kecenderungan yang menurun, begitu juga di Maluku dan Papua. Sebaliknya, semua provinsi di Sulawesi mempunyai kecenderungan tingkat dispersi yang meningkat, kecuali Sulawesi Tenggara. Tingkat dispersi di Bali dan Nusa Tenggara Timur juga mempunyai kecenderungan yang meningkat, kecuali Nusa Tenggara Barat.

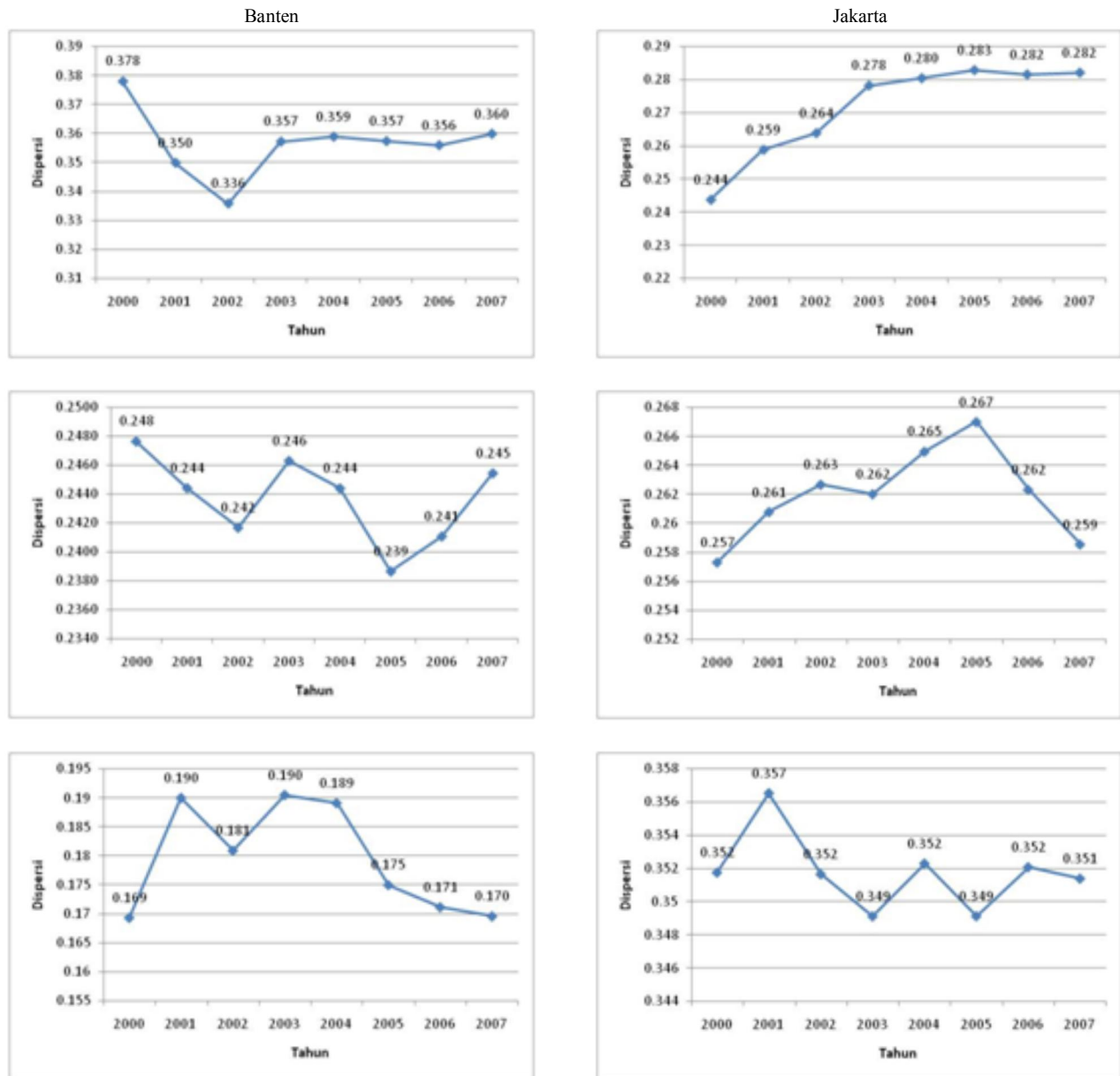


Gambar 4.2

Hasil Perhitungan Konvergensi di Pulau Sumatera

Kecenderungan tingkat dispersi yang menurun mengindikasikan bahwa gap pendapatan per kapita semakin mengecil sehingga wilayah miskin dapat segera mengejar ketertinggalannya dengan wilayah kaya. Sebaliknya, kecenderungan tingkat dispersi yang meningkat mengindikasikan bahwa gap pendapatan per kapita semakin melebar sehingga

wilayah miskin semakin jauh tertinggal dan tidak bisa mengejar ketertinggalannya. Atau dengan kata lain, kota/kabupaten miskin sulit untuk mengejar dan mensejajarkan dengan kota/kabupaten kaya. Kondisi ini tentu saja menuntut peran pemerintah yang serius dalam mengatasi masalah di wilayah miskin yang sulit untuk mengejar ketertinggalannya.

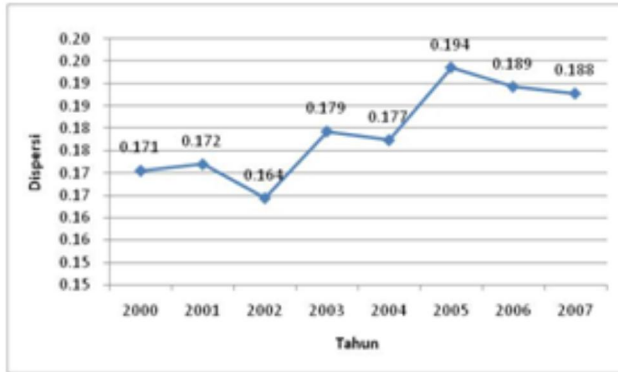


Gambar 4.3
Hasil Perhitungan Konvergensi σ di Pulau Jawa

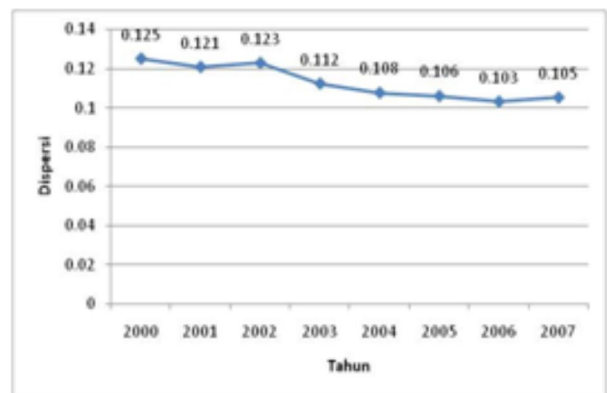
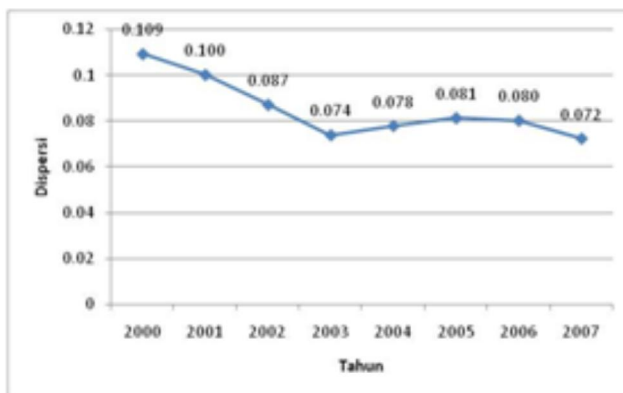
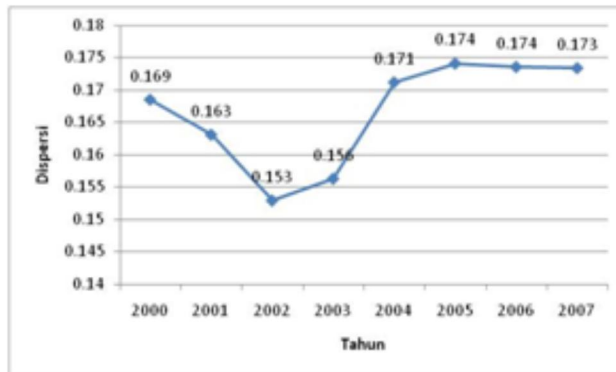
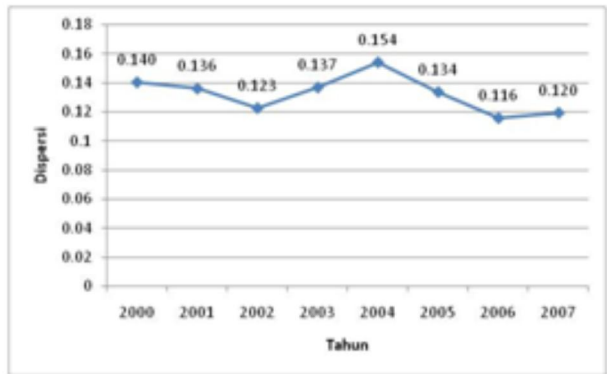
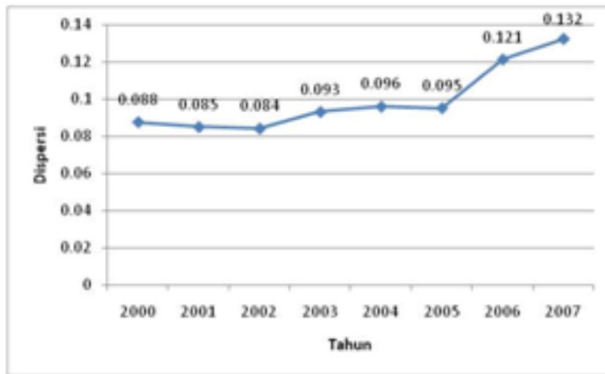
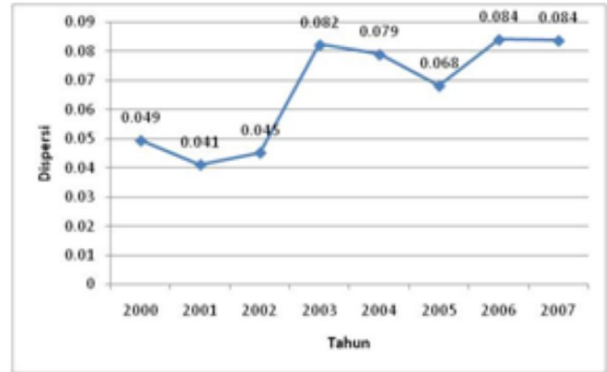
Dari hasil estimasi konvergensi absolut dan konvergensi sigma, hanya beberapa provinsi yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil yang tidak konsisten ditunjukkan dengan apabila estimasi konvergensi absolut menuju ke konvergen maka hasil perhitungan konvergensi sigma menunjukkan hasil yang cenderung naik, atau, estimasi konvergensi absolut ialah tidak konvergen dan perhitungan konvergensi sigma cenderung turun. Sebaliknya, hasil yang konsisten ditunjukkan dengan apabila estimasi konvergensi absolut menuju ke konvergen maka hasil perhitungan konvergensi sigma menunjukkan hasil yang cenderung turun,

atau sebaliknya, estimasi konvergensi absolut ialah tidak konvergen dan perhitungan konvergensi sigma cenderung meningkat. Hasil perhitungan yang konsisten ditunjukkan pada provinsi Jawa Barat, hasil estimasi konvergensi absolut adalah konvergen, sedangkan dari hasil konvergensi sigma, tingkat dispersinya menunjukkan kecenderungan yang menurun. Begitu juga dengan provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan semua provinsi di Sulawesi kecuali Sulawesi Tenggara mempunyai konvergensi absolut yang tidak konvergen dan tingkat dispersi yang meningkat.

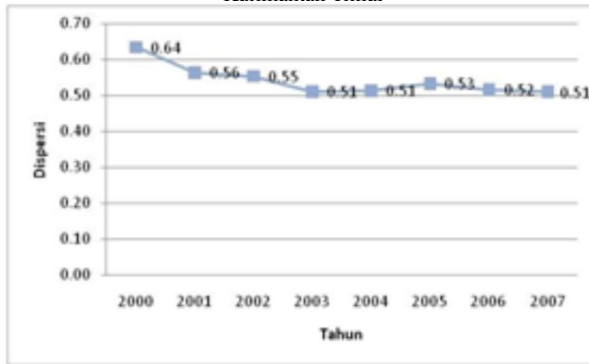
Sulawesi Utara



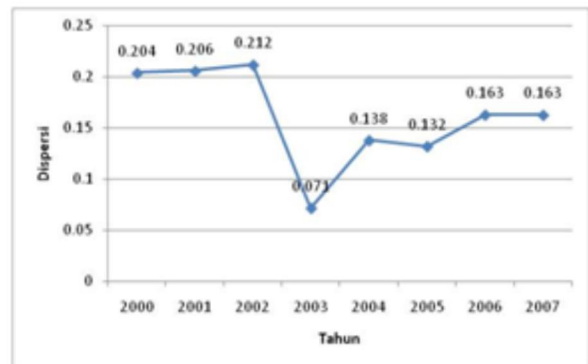
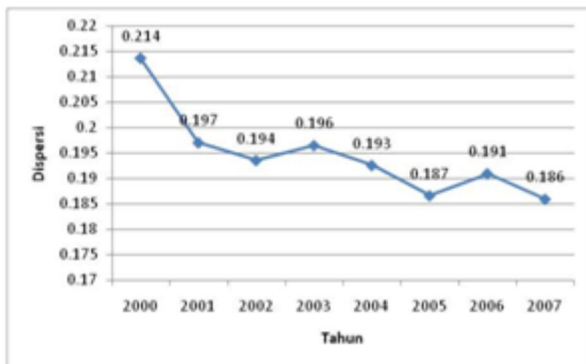
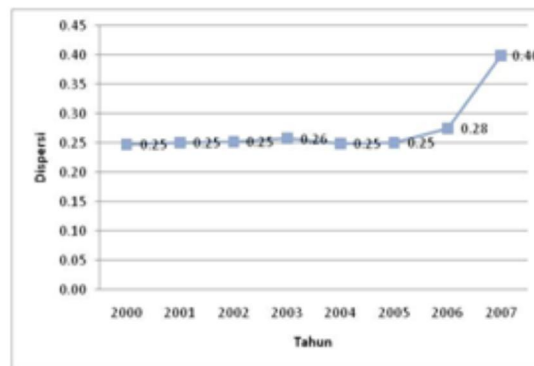
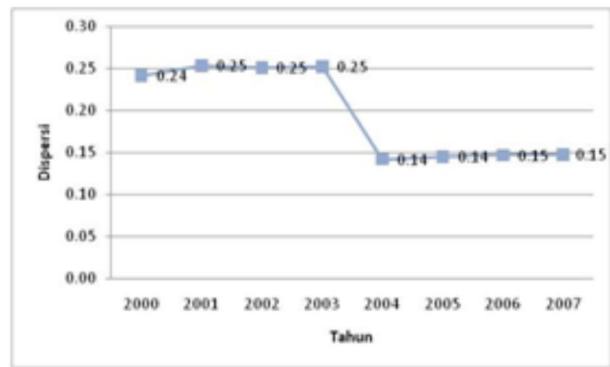
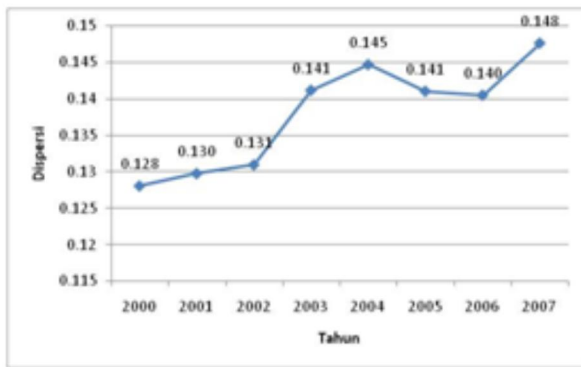
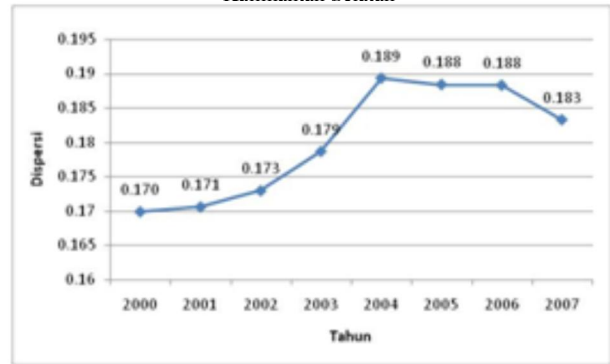
Gorontalo

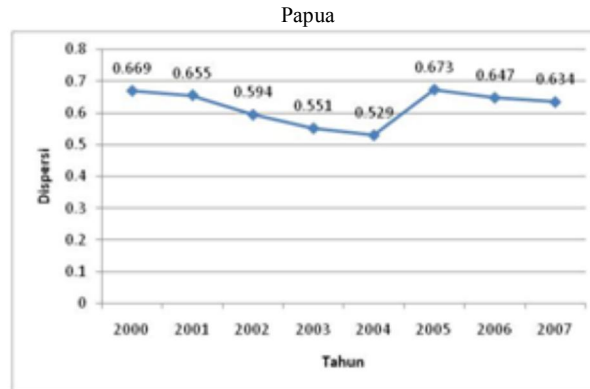


Kalimantan Timur



Kalimantan Selatan





Gambar 4.7

Hasil Perhitungan Konvergensi di Pulau Maluku dan Papua

Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya telah membentuk program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah di antaranya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Keluarga Berencana (KB), kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar, pangan dan gizi), pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Program penanggulangan kemiskinan lainnya berupa penyediaan beras subsidi untuk rakyat miskin, program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin, program bantuan langsung tunai (BLT) (world Bank, 2007).

Pada kenyataannya program-program tersebut kurang efektif dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Prayogi (2009), program-program tersebut tidak secara nyata terserap oleh masyarakat kurang mampu. Masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum bisa menikmati program tersebut. Sebaliknya, ada masyarakat yang dianggap mampu tetapi bisa menikmati program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, banyak program antar departemen yang tidak terkoordinasi. Antar departemen di pemerintahan pusat punya agenda pengurangan penduduk miskin sendiri-sendiri. Selanjutnya, pemerintah daerah (pemda) juga punya rencana aksi yang sama dan tidak terkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa banyak program yang dilakukan

pemerintah dalam membrantas kemiskinan tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk dari bantuan langsung tunai maupun non-tunai. Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan langsung tunai dalam pembentuk pemberian uang maupun sembako untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidak untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kederewanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat. Program-program bantuan langsung tunai maupun non-tunai ini bahkan menimbulkan penyalahgunaan dalam penyalurannya (Rahayu dan Fillaili, 2007).

Ketidakmampuan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menangani masalah ketimpangan. Seiring dengan proses pembangunan, dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi belum dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata. Hal ini menimbulkan ketimpangan antar daerah. Ketimpangan hasil pembangunan inilah yang menjadi permasalahan utama di Indonesia. Heshmati (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia ternyata diimbangi dengan kebijakan distribusi pendapatan yang tidak merata. Selain itu, peningkatan ketimpangan juga mengiringi pertumbuhan ekonomi.

Penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang jelas. Untuk itu perlu program pemerintah yang ditangani secara benar dan dampaknya bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Program yang perlu ditawarkan kepada masyarakat harus program yang riil yang bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di wilayah-wilayah miskin di Indonesia. Adapun program yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memetakan potensi sumber daya

yang ada di wilayah miskin tersebut, mengidentifikasi sumber daya manusia yang akan diberi pendidikan dan ketrampilan, membina dengan memberikan pendidikan (tidak harus formal) dan ketrampilan secara intensif kepada SDM yang sudah diidentifikasi, memberikan bantuan modal untuk keperluan usaha yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan ketrampilannya, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SDM yang di bina melalui pendidikan dan ketrampilan tersebut.



5. KESIMPULAN

Berdasarkan studi konvergensi absolut a di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi koefisien b dan β menunjukkan sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia tidak konvergen. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir semua kota/kabupaten tertinggal di Indonesia sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Selanjutnya, dari hasil perhitungan konvergensi σ ternyata juga mendukung hasil perhitungan konvergensi absolut. Sebagian hasil perhitungan konvergensi σ juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Tingkat dispersi yang cenderung meningkat mengindikasikan bahwa gap pendapatan per kapita semakin melebar sehingga wilayah miskin semakin jauh tertinggal dan tidak bisa mengejar ketertinggalannya. Atau dengan kata lain, kota/kabupaten miskin sulit untuk mengejar dan menjejalkan dengan kota/kabupaten kaya.

Kondisi ini tentu saja menuntut peran pemerintah yang serius dalam mengatasi masalah di wilayah

miskin yang sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Untuk itu perlu program penanggulangan kemiskinan yang ditangani secara benar dan dampaknya bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Program yang perlu ditawarkan akat harus program yang riil yang bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di wilayah-wilayah miskin di Indonesia. Adapun langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah memetakan potensi sumber daya yang ada di wilayah miskin, mengidentifikasi sumber daya manusia yang akan diberi pendidikan dan ketrampilan, membina dengan memberikan pendidikan (tidak harus formal) secara intensif kepada SDM yang sudah diidentifikasi, memberikan bantuan modal untuk keperluan usaha yang telah disesuaikan dengan kemampuan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SDM yang dibina melalui pendidikan dan ketrampilan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X.X. 1992. *Convergence*. Journal of Political Economy. 100(2): 223-251.
- _____. 1995. *Economic Growth*. New York: McGraw-Hill.
- Cass, D. 1965. *Optimum Growth in an Agregative Model of Capital Accumulation*. Review of Economic Studies. 32(91): 233-240.
- Heshmati, A. 2004. *Growth, Inequality and Poverty Relationship*. Seoul National University: MTTEconomic Research and IZA Bonn. Discussion Paper No. 1338:18.
- Koopmans, T.C. 1965. *On the Concept of Optimal Economic Growth in Pontificia Academia Scientiarum*. The econometric approach to development planning. Amsterdam: North-Holland: 225-287.
- Newbold, P., Carlson, W.C. and Throne, B. 2010. *Statistics for Business and Economics*. 7th Edition. New Jersey : Pearson Education Inc.
- PNPM Mandiri. 2010. *Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam PNPM Mandiri*. Jakarta : Sekretariat Tim Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
- Prayogi, W.E. 2009. *LIPi: Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Tidak Efektif*. 29 Desember 2009. <<http://www.detikfinance.com/read/2009/12/29/155340/1267900/4/>>.
- Rahayu dan Fillaili. 2007. *Pengalaman Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Laporan SMERU. No 23:5-10.
- Sala-i-Martin, X.X.. 1996. *The Clasical Approach to Convergence Analysis*. The Economic Journal: Vol. 106. No. 437: 1019-1036.
- Verbeek, M. 2001. *A Guide to Modern Econometrics*. West Sussex : John Wiley & Sons, Ltd.
- World Bank. 2007. *Era Baru Dalam Pengetasan Kemiskinan di Indonesia*. Laporan Ikhtisar Bank Dunia: 3-30.